

SKRIPSI

**PARTISIPASI KOMUNITAS ADAT TOWANI TOLOTANG DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG)
DI KELURAHAN AMPARITA KABUPATEN SIDRAP**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin*



Oleh :

Muhammad Yusuf Rahmatullah

E041201013

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**PARTISIPASI KOMUNITAS ADAT TOWANI TOLOTANG DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DI
KELURAHAN AMPARITA KABUPATEN SIDRAP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh :

Muhammad Yusuf Rahmatullah

E041201013

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PARTISIPASI KOMUNITAS ADAT TOWANI TOLOTANG DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DI
KELURAHAN AMPARITA KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan Diajukan Oleh:

Muhammad Yusuf Rahmatullah

E041201013

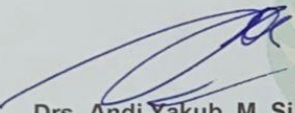
Akan dipertahankan dan dihadapkan Tim Penguji Skripsi

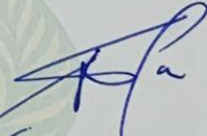
Pada Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.
NIP. 196921231 199003 1 023


Haryanto, S. IP., M. A.
NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.
NIP. 196921231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI
PARTISIPASI KOMUNITAS ADAT TOWANI TOLOTANG DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DI
KELURAHAN AMPARITA KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan Diajukan Oleh :
Muhammad Yusuf Rahmatullah

E041201013

Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada
Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.	(.....)
Sekretaris	: Haryanto, S.IP., M.A.	(.....)
Anggota	: Prof. Dr. Armin Arsyad, S.IP., M.Si.	(.....)
Anggota	: Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si.	(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Rahmatullah

NIM : E041201013

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Partisipasi Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Yusuf Rahmatullah

NIM E041201013

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah robbil alamin. Segala Puja dan Puji bagi Allah SWT yang banyak dan tak berkesudahan yang telah memberikan ridho-Nya karena penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Partisipasi Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Desa Amparita Kabupaten Sidrap" pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada program studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karenanya kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis (Almh) H. Muhammad Yunus dan Hj. Syamsuriah Ibu tercinta yang saya sayangi sekali, yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan, memberikan dukungan, dan pengertiannya kepada penulis untuk terus belajar demi menyelesaikan studi tanpa mengenal rasa lelah, pamrih, suka maupun duka. Kepada kakak penulis Yusri, Zulkarnain, S.E., Suriyanti, A.Md. Kep., Suriyadi, A.Md. P., dan Suriyanto S.H., serta seluruh keluarga besar penulis yang

senantiasa mendukung dan memberikan perhatian yang baik selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di program studi Ilmu Politik;
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan;
3. Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Departemen Program Studi Ilmu Politik Saya sekaligus Penasehat Akademik dan pembimbing I saya yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu pengetahuan dan berbagai pengalaman kepada saya;
4. Haryanto, S. IP., M. A., sebagai pembimbing II saya yang senantiasa memberikan masukan, arahan, dan nasihat dalam membimbing penulisan skripsi saya.
5. Prof. Dr. Armin Arsyad, S. IP., M. Si. Dan Dr. Gustiana A. Kambo, S. IP., M. Si., selaku penilai/penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Politik.
7. Kepada seluruh tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.

8. Kepada Rekan-rekan HIMAPOL FISIP UNHAS yang telah memberikan pengalaman yang singkat dan baik dalam berorganisasi kurang lebih lamanya 10 bulan.
9. Kepada teman-teman DINAMIS ANGKATAN 2020 yang sangat keren yang telah memberikan banyak kenangan manis, pahit, asam, dan asin serta senantiasa memberikan support, nasehat dan doa.
10. Kepada Danni, Gope, Sessung, Ade, Mail, Fito, Dzakhir, Karddy, Raihan, Zam, Tasya, Santi, Fira, Etsuko, dan Dilla yang senantiasa menemani dan menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Kepada sahabat sejati Abim, Eki, dan Arfan yang telah banyak memberikan masukan dan senantiasa menemani saya didalam suka maupun duka dari mulai awal semester sampai dengan penyusunan tugas akhir ini;
12. Kepada seseorang yang saya kagumi yang tidak dapat saya sebutkan namanya, yang telah memberikan saya arti dan motivasi hidup dari sebuah perjuangan untuk tetap melangkah di setiap harinya.
13. Dan terakhir untuk rekan/kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang juga tak henti-hentinya memberikan support kepada saya. Sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan kebersamaannya.

Akhirnya saya sebagai penulis mengharap semoga tugas akhir ini merupakan langkah awal penemuan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik, yang kemudian dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya, serta juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan menghargai semua

saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari setiap pihak yang membaca skripsi ini. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 17 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Yusuf Rahmatullah', written in a cursive style.

Penulis

(Muhammad Yusuf Rahmatullah)

ABSTRAK

Muhammad Yusuf Rahmatullah E041201013. *Partisipasi Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap.* Di bawah bimbingan Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D. dan Haryanto, S.IP, M.A.

Tujuan penelitian ini adalah ingin memberikan pemahaman mendalam mengenai keterlibatan proses komunitas Towani Tolotang yang otonom dan mobilisasi dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan dan memberikan penjelasan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi Mobilisasi dan partisipasi Otonom Towani Tolotang dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Amparita. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa terjadi partisipasi politik mobilisasi yang dapat menciptakan partisipasi politik dalam bentuk otonom.

Dasar penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dimana tipe penelitian ini memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Teknik analisa datanya yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam memastikan keabsahan data peneliti menguji kredibilitasnya dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun sumber data yang didapatkan peneliti meliputi data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, komunitas adat Towani Tolotang mengalami krisis kepaakan terhadap Musrembang sehingga kurangnya partisipasi dan kepaakan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan diperlukannya partisipasi mobilisasi guna untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta dan terlibat. Dengan partisipasi mobilisasi tersebut, terdapat partisipasi otonom (kesadaran masyarakat) akan pentingnya suatu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan suatu pembangunan. Terdapat juga tidak terealisasinya suatu pembangunan dikarenakan kurang tepatnya suatu perencanaan sehingga membutuhkan Towani Tolotang untuk ikut mendukung dan membantu dalam proses tersebut.

Kata Kunci : Partisipasi, Towani Tolotang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

ABSTRACT

Muhammad Yusuf Rahmatullah E041201013. *Participation of the Towani Tolotang Traditional Community in Development Planning Deliberations (Musrembang) in Amparita Village, Sidrap Regency.* Supervised by Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D. dan Haryanto, S.IP, M.A.

The aim of this research is to provide an in-depth understanding of the involvement of the autonomous Towani Tolotang community and mobilization processes in development planning deliberations and provide an explanation of the supporting factors and inhibiting factors for Towani Tolotang Autonomous Mobilization and participation in development planning deliberations in Amparita Subdistrict. Based on the data that the author obtained, there is mobilization of political participation which can create political participation in an autonomous form.

The basis of this research is qualitative with a descriptive research type, where this type of research provides a clear picture of the problems being studied based on the experiences experienced by the informants. The data analysis technique is interviews and documentation. In ensuring the validity of the data, researchers test its credibility using data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data sources obtained by researchers include primary data and secondary data.

Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the Towani Tolotang traditional community is experiencing a crisis of commitment to Musrembang so that there is a lack of participation and consent in development planning deliberations, mobilization participation is needed in order to invite the community to participate and be involved. With this mobilization participation, there is autonomous participation (public awareness) of the importance of planning, implementing and utilizing development. There is also the failure to realize development due to lack of precise planning, requiring Towani Tolotang to support and assist in the process.

Keywords : Participation, Towani Tolotang, Development Planning Deliberation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Akademis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Konsep Partisipasi Masyarakat	11
2.3 Teori Partisipasi Politik	17
2.4 Konsep Perencanaan Pembangunan	24
2.4.1 Musrembang	26
2.5 Kerangka Berfikir	31
2.6 Skema Penelitian	33
2.7 Fokus Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	35
3.3 Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1 Keadaan Geografis	40
4.2 Keadaan Demografi	41
4.3 Sejarah Berdirinya Komunitas Adat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Partisipasi Komunitas Adat Towani Tolotang dan Faktor-faktor yang	

Mempengaruhi Partisipasi Dalam Musrebang.....	46
5.1.1. Partisipasi Politik Otonom.....	46
5.1.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Otonom	50
5.1.3. Partisipasi Politik Mobilisasi.....	56
5.1.4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Mobilisasi	58
BAB VI PENUTUP	62
6.1. Kesimpulan.....	62
6.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

1.1. Gambar Struktur Tahapan Musrembang, Sumber (Paselle, 2013).....	28
1.2. Jumlah Penduduk Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpo'e, Kabupaten sidrap.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang partisipasi komunitas adat dalam proses perencanaan pembangunan khususnya komunitas adat Towani Tolotang yang berada di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang. Didalam proses perumusan perencanaan pembangunan berkaitan dengan aktivitas bagaimana sebuah perencanaan pembangunan disusun, kapan dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut. Substansi perencanaan pembangunan berbicara mengenai apa isi dari perencanaan pembangunan yang telah disusun, permasalahan pokok dan isu-isu strategi yang mendesak untuk diselesaikan dalam pembangunan.¹ Agar pembangunan berjalan sebagai yang kita harapkan, Maka diperlukan partisipasi dari masyarakat Towani Tolotang dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran komunitas adat akan minat dan kepentingan serta strategi yang diterapkan adalah strategi penyadaran. Dengan hal ini perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian komunitas adat dalam jangka panjang. Musrembang dapat digunakan sebagai proses bernegosiasi, berkonsultasi, dan berharmonisasi antara pemerintah dan

¹ Tjokrowinoto, Moeljarto, 1987. Politik Pembangunan: Sebuah Analisis KonsepArah dan Strategi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1987.

pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsesus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan bagi komunitas adat Towani Tolotang.

Keterlibatan partisipasi masyarakat Towani Tolotang khususnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan sangat rendah, terlihat dari hanya beberapa saja warga yang menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan bahkan hanya dihadiri oleh salah satu perwakilan kelompok warga. Sehingga dalam hal ini pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan tidak berjalan baik.² Padahal nilai norma, sikap, dan nilai kepercayaan komunitas Towani Tolotang bersumber pada paseng dan pemmali yang idealnya sangat mudah melibatkan kehadiran masyarakat. Soliditas dan solidaritas bagi kalangan komunitas ini adalah hal yang penting pada pelaksanaan kemasyarakatan. Soekanto (2001:91) mengungkapkan bahwa masyarakat adat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan didalam kemasyarakatannya.³ Begitu juga yang terjadi dalam komunitas Towani Tolotang yang mempunyai nilai sikap, norma, dan kepercayaan yang dianut serta kepatuhan terhadap suatu pemimpin dengan hal ini *Uwa* menjadikan suatu kebudayaan masyarakat komunitas Towani Tolotang.

Kurangnya partisipasi komunitas adat Towani Tolotang di Kelurahan Ampartia tentu akan menghambat sebuah proses pembangunan. Idealnya

² Mustanir Ahmad, M. Rais. 2017. "Keterlibatan Partisipasi Masyarakat Towani Tolotang Dalam Perencanaan Pembangunan". Dalam *Jurnal Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan*. Sulawesi Selatan: STISIP Muhammadiyah Rappang Sidrap.

³ Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tjokrowinto mendefinisikan makna perencanaan pembangunan sebagai konsep yang meliputi dua aspek yaitu: Pertama, sebagai suatu proses perumusan perencanaan pembangunan. Kedua, sebagai substansi perencanaan pembangunan itu. Proses perumusan perencanaan pembangunan berkaitan dengan aktivitas bagaimana sebuah perencanaan pembangunan disusun, kapan dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut. Substansi perencanaan pembangunan berbicara mengenai apa isi dari perencanaan pembangunan yang telah disusun, permasalahan pokok dan isu-isu strategi yang mendesak untuk diselesaikan dalam pembangunan.⁴

Dalam konteks sosial-politik adat tradisional komunitas Towani Tolotang secara keseluruhan kepercayaan mempunyai pengaruh kuat, atau bahkan mendominasi pandangan hidup para penganutnya. Dengan demikian, kepercayaan Towani Tolotang selain mempunyai fungsi penting pemelihara emosi keagamaan juga pemelihara intergrasi sosial. Komunitas Towani Tolotang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi yang disebut “Uwatta dan uwa-uwa” yang memimpin kelompok-kelompok kecil di bawahnya. Uwa dalam komunitas Towani Tolotang merupakan simbol dalam pengambilan keputusan tertinggi pada komunitas Tolotang yaitu memiliki pandangan bagi keyakinan masyarakat tentang tujuan hidup bersama, artinya Uwa dalam segala pengambilan keputusan merupakan representasi dari kelompok masyarakat Towani Tolotang. Namun, pada keyataannya keputusan itu hanya berada pada aspek religius.

Uwa' atau uwatta sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat Tolotang

⁴ Tjokrowinoto, Moeljarto, 1987. Politik Pembangunan: Sebuah Analisis KonsepArah dan Strategi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1987.

tentu punya andil yang besar dalam memobilisasi masyarakatnya. Uwa' dalam kapasitasnya sebagai pemimpin agama di wilayah Amparita sangat membantu pemerintah lokal. Uwa' sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat setempat sehingga juga menjadikan wibawa pemimpin agama ini relatif besar, sehingga masyarakat akan taat pada kebijakan yang diambil oleh Uwa' dan dapat membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kontestasi politik seperti pemilihan umum dapat memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik karena pemimpin agama mempunyai ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir beberapa gagasan untuk kepentingan masyarakat, pemimpin adat diharapkan mampu menyambut kebijakan pemerintah.

Pengaruh Uwa dan tokoh masyarakat dalam komunitas Tolotang sangatlah penting karena selain sebagai orang tua di dalam ranah kepercayaan mereka juga sebagai orang yang bisa menjaga keutuhan komunitas Tolotang sampai sekarang. Maka dari itu masyarakat Komunitas Tolotang sangatlah berpedoman kepada apa yang dikatan oleh Uwa baik di dalam aspek mengenai kepercayaan mereka, pilihan-pilihan politik mereka, dan tingkat partisipasi mereka didalam sebuah Musrembang. Apapun yang dikatakan Uwa mereka harus mematuhi keputusan itu, sehingga hal ini tingkat otonom (kesadaran diri) masyarakat dipengaruhi oleh mobilisasi. Hal itulah yang menjadikan Uwa dengan mudah mempengaruhi serta memobilisasi dengan mudah anggotanya, kepatuhan masyarakat kepada Uwa' menjadikannya elit penentu partisipasi masyarakat Tolotang dalam Musrembang di Amparita.

Musyawarah perencanaan pembangunan adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara terbuka yang berusaha bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan. Akan tetapi Isolasi (terisolasi) yang terjadi di komunitas Towani Tolotang membuat masyarakat adat mempunyai norma tersendiri dalam melakukan interaksi sosial, dan norma yang berlaku dalam masyarakat mereka bersifat mengikat anggotanya dengan aturan-aturan yang harus (wajib) mereka taati serta ganjaran-ganjaran yang harus diterima oleh mereka yang lalai dalam menjalankan norma agamanya dengan hal ini dapat menimbulkan masyarakat yang pasif atau tidak terbuka terhadap lingkungan sekitar. Sehingga hal ini membuat masyarakat Towani Tolotang terisolasi dengan nilai norma, nilai sikap, dan nilai kepercayaannya yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Didalam Musrembang desa tentu berbicara mengenai keterlibatan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi dan bertanggung jawab dalam hasil-hasil Musrembang, serta memanfaatkan hasil-hasil kegiatan pembangunan yang diusulkan.

Proses perencanaan pembangunan desa yang efektif seharusnya dapat melibatkan masyarakatnya terkhusus komunitas adat Towani Tolotang dalam meningkatkan kurangnya nilai partisipasi dalam proses musyawarah perencanaan

pembangunan di Kelurahan Amparita. Unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang keterlibatan masyarakat adat tradisional di dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sehubungan dengan hal ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Partisipasi Komunitas Towani Tolotang Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Amparita?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Towani Tolotang dalam Musrembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Mengetahui keterlibatan proses komunitas Towani Tolotang yang otonom dan mobilisasi dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan.

2. Mengetahui tentang faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi Komunitas Towani Tolotang dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa Amparita.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas terdapat beberapa manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tetntang partisipasi komunitas adat Towani Tolotang dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
- b. Dapat memberikan konsep partisipasi masyarakat, teori partisipasi politik dan konsep perencanaan pembangunan dalam ilmu pembangunan desa terutama pada perencanaan pembangunan yang partisipatif.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi terkait nilai sosial budaya dengan nilai norma, sikap, dan kepercayaan komunitas adat Towani Tolotang.
- b. Memberikan informasi terkait pengaruh *Uwa* didalam masyarakat Towani Tolotang dalam berpartisipasi perencanaan pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa kerangka konsep yang relevan dengan judul atau rumusan masalah yang akan diteliti. Peneliti mencoba menjadikan konsep tersebut sebagai alat analisis tentang Partisipasi Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa

Amparita Kabupaten Sidrap. Untuk lebih memperjelas maka penulis menggunakan konsep partisipasi masyarakat untuk melihat komunitas adat dalam Musrenbang. Aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai upaya bagi penulis untuk mencari referensi atau perbandingan penelitian yang penulis lakukan dengan berjudul “Partisipasi Masyarakat Towani Tolotang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Amparita Kabupaten Sidrap”. Dengan berbagai literatur adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Dalam penelitian Erlina Farmalindah (2012) “Komunitas Towani Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang”. Penelitian ini membahas gambaran interaksi sosial masyarakat Towani Tolotang berdasarkan nilai-nilai agama yang dianutnya dan pola pendidikan agama masyarakat Towani Tolotang di Kab. Sidrap. Penelitian ini dan penulis mempunyai kesamaan dengan melihat masyarakat Towani Tolotang berdasarkan nilai kepercayaannya sebagai interaksi sosial bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (masyarakat Towani Tolotang) seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan memudahkan untuk mengelaborasi berbagai data yang didapatkan dilapangan. Perbedaan peneliti dan penulis yaitu dari segi titik fokus pembahasan.

Dalam penelitian Ahmad Mustanir, M. Rais Rahmat Razak (2017) “Nilai Sosial Budaya pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang dalam Musyawarah Rencana Pembangunan”. Penelitian ini membahas keterlibatan

masyarakat Etnik Towani Tolotang khususnya dalam musyawarah rencana pembangunan sangat rendah bahkan hanya dihadiri oleh salah satu perwakilan kelompok warga saja sehingga pendekatan partisipatif yang digunakan peneliti dalam musyawarah rencana pembangunan tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini dan penulis mempunyai kesamaan dengan melihat keterlibatan Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif (mix), untuk memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang ada dan teknik analisis data akan diklasifikasi dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti serta cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Dalam penelitian Wirda Afni (2013) “Analisis Pelaksanaan Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan desa Teluk Lecah dan faktor penghambat pelaksanaan pembangunan. Peneliti berpendapat bahwa dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten yang cukup berkembang dan memiliki tempat wisata yang sangat strategis, khususnya di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert.

Akan tetapi hal ini belum bisa dikelola oleh Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert ini disebabkan karena minimnya pembangunan yang bisa mempercepat

lajunya perkembangan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert. Dilihat dari kondisi sekarang ini maka banyak yang harus dibenahi dalam proses pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana di Desa Teluk Lecah, hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja pemerintahan Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert itu sendiri. dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini dan penulis mempunyai kesamaan dengan melihat bagaimana partisipasi masyarakat desa atau partisipasi komunitas adat dalam proses pembangunan, dan juga peneliti juga menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa informasi lebih mendalam melalui wawancara dengan informan. Perbedaan peneliti dan penulis yaitu dari segi tempat dan komunitas adat.

2.2 Konsep Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi diserap dari bahasa asing participation, yang memiliki arti mengikutsertakan pihak lain. Sedangkan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata partisipasi memiliki arti yakni perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; dan peran serta. Konsep partisipasi sendiri dalam perkembangannya memiliki pengertian yang beragam, tetapi memiliki persamaan dalam beberapa hal. Menurut Adisasmita (dalam Latif, Rusdi, Mustanir & Sutrisno, 2019) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari beberapa hal

dalam program pembangunan diantaranya, pemberdayaan masyarakat, peran dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu partisipasi masyarakat juga merupakan aktualisasi, kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.⁵

Menurut (A Mustanir & Razak, 2017), partisipasi yang sesungguhnya adalah partisipasi yang menghasilkan pemberdayaan, yaitu partisipasi yang merupakan sebuah tujuan dalam proses demokrasi, berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat dan dikelola dalam masyarakat.⁶ Sedangkan Mubyarto (dalam Laily, 2015) mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu keberhasilan setiap program pemerintah sesuai dengan kemampuan diri tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.⁷ Sedangkan Arimbi (dalam Laily, 2015) mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information* yang merasakan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Laily, 2015).⁸

Menurut Juliantara (dalam Deviyanti, 2013) mengartikan partisipasi sebagai kebebasan berbicara dan keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan yang mewakili kepentingan untuk berperan aktif berpartisipasi secara konstruktif. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam

⁵ Latif, A., Rusdi I.,M., Mustanir, A.,& Sutrisno,M. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng PanuaKecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Jurnal Moderat*,5(1),3

⁶ Mustanir, A., & Razak. 2017. Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan. Konferensi Nasional ke-6 & Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah¹ Aisyiyah (APPPTM)

⁷ Mubyarto, et, al, 2015. Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kajian Bersama Pengembangan Kebijakan, Yogyakarta: Aditya Media

⁸ Arimbi, Mas, Achmad. 2015. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.

beberapa tahap mulai dari (1) proses mengidentifikasi masalah dan potensi; (2) proses pemilihan dan pengambilan keputusan sebagai alternatif solusi untuk menangani masalah yang ada; (3) proses pelaksanaan dalam mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses melakukan evaluasi dari kebijakan yang diterapkan.⁹

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses kepesertaan seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dimulai dari tahap memberikan masukan, membuat keputusan dalam proses perencanaan, dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, mengevaluasi hasil pembangunan dan merasakan manfaat yang diperoleh dari proses pembangunan.

Maka dari itu, partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam proses perencanaan pembangunan, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan (A. Mustanir, 2015), menegaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan adalah suatu partisipasi nyata.¹⁰

Selain itu partisipasi itu berproses dan untuk membedakan prosesnya dibuatlah tingkatan partisipasi. Teori tingkat partisipasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembobolan terhadap tolak ukur tingkat partisipasi

⁹ Deviyanti, D. 2013. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Kelurahan Karang Jati Kecamatan BalikPapan Tengah. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2).

¹⁰ Fatima, Y. C. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang)

masyarakat. Konsep tingkat partisipasi dari berbagai teori dan pengalaman dalam bidang perencanaan partisipatif. Maka dari itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi dalam masyarakat, (Satries, 2011) menawarkan sebuah teori yang dinamakan sebagai teori *the ladder of participation*.¹¹ Teori ini menyatakan terkait tahapan-tahapan dalam proses partisipasi masyarakat. Arnstein dalam teorinya membagi partisipasi menjadi delapan tahap sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat.

Adapun faktor pendukung Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut (Sari, 2016) terdiri dari:

1. Faktor kesadaran/kemauan yakni keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.
2. Adanya partisipasi masyarakat yakni partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat sehingga keikutsertaan mereka berasal dari perwujudan bersama, bukan karena dorongan hati nurani sendiri. Ini merupakan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.
3. Adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum.

¹¹ Satries, W. I. 2011. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang. Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 2

Sedangkan, faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut (Sari, 2016), yaitu:

1. Rendahnya kualitas pendidikan sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah.
2. Tingkat pendapatan yang rendah produktivitasnya yang sangat rendah.
3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan Indonesia sebagai Negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilnya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian.¹²

Menurut Marshal (2006) Partisipasi masyarakat diukur melalui indikator berikut :

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat. Tersedianya forum atau media untuk menampung partisipasi masyarakat. Forum atau media ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan partisipasinya beserta akan meningkatkan partisipasi tersebut.
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses. Masyarakat mampu dalam terlibat proses terjadinya partisipasi. Ini juga berarti masyarakat harus memiliki kemampuan atau keahlian pada saat terlibat dalam partisipasi.
3. Adanya akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat diberi akses dalam menyampaikan pendapatnya saat proses pengambilan keputusan.

¹² Sari, I. P, Santoso Sastroepoetra. 2016. Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara). Jurnal Ekonomi(JE),1(1), 179-188.

Akses ini mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area *Good Governance* yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang publik.¹³

Berikut juga penjelasan mengenai faktor pendukung partisipasi melalui faktor kesempatan, kemauan, dan kemampuan menurut Slamet, (Nurbaiti, 2017:227) :

1. Kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi. Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi salah satunya ialah melalui peran pemerintah.
2. Kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, seperti adanya manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut.
3. Kemampuan partisipasi, salah satunya ialah kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).¹⁴

Kemudian faktor penghambat partisipasi meliputi sifat individu, kondisi geografis dan ekonomi :

1. Sifat yang dimiliki individu dapat menghambat partisipasi masyarakat,

¹³ Marshall. 2006. Indikator Partisipasi Masyarakat.

¹⁴ Nurbaiti, S. Robiah, dan Aziz Nur Bambang. (2019). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Program dalam Corporate Partisipasi Pelaksanaan Social Responsibility (CSR). Proceeding Biology Education Conference. Vol. 14 (1): 224-228

seperti sifat malas, apatis, masa bodoh dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.

2. Demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya.
3. Faktor ekonomi meliputi penghasilan dan mata pencaharian masyarakat. Pekerjaan dan penghasilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

2.3 Teori Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partispate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).¹⁵

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan

¹⁵ Magai, A., Mamentu, M., & Potabuga, J. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Amole Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika).

politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.¹⁶

Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, "Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal".¹⁷ Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) "Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan".¹⁸

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi "model baru" yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling

¹⁶ Surya, I., Sos, S., & Dyastari, L. (2017). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.

¹⁷ Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi. ed. Hetifah. Surakarta: Kompip Solo

¹⁸ Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi. ed.Histiraludin. Surakarta: Kompip Solo

memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Slamet (2003:8) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis,¹⁹ yaitu :

1. Partisipasi politik (political participation)
2. Partisipasi social (sosial participation)
3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik (political participation) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi social (social participation) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

¹⁹ Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press

3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas.

Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan

sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program,

implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah dalam suatu pembangunan dalam bentuk suatu pengembangan pemberdayaan desa atau peningkatan kualitas desa, baik dilakukan dengan partisipasi perseorangan ataupun kelompok.

Didalam Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Oleh karena itu, Sigalingging dan Warjio mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki posisi yang penting dalam perencanaan dan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Pembangunan desa membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam keseluruhan tahap pengembangan mulai tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan.²⁰ Namun jika kita meninjau kembali, model pembangunan dari atas ke bawah (top-down) belum maksimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu disahkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan. UU tersebut menekankan pada perpaduan pendekatan konsep antara top-down dan bottom-up yang menekankan cara-cara

²⁰ Sigalingging, A. Henry. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2, No. 2. Pp 116-145

aspiratif dan partisipatif. Akan tetapi, dalam realitas sering terjadi ketidaksadaran masyarakat dalam berpartisipasi.

Selain dari ketidaksadaran masyarakat, ada juga faktor lain yang dikarenakan terjadinya pergeseran kultur (budaya). Pergeseran kultur sangat terlihat jelas dari sisi budaya dalam hal gotong royong atau kerja sama telah pudar. Pudarnya budaya yang dianut oleh masyarakat desa dikarenakan poros kehidupan masyarakat telah bergeser dari masyarakat desa menjadi masyarakat desa kota. Jika hal ini terjadi, sebaik apapun sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah maupun masyarakat telah berorientasi pada kepentingan masyarakat tidak mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Mobilisasi partisipasi merupakan salah satu upaya mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mendapat respon dari masyarakat melalui gerakan partisipasi aktif. Dalam artian masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan akan mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik). Dengan adanya mobilisasi partisipasi yang diperankan oleh pemerintah dapat menyadarkan masyarakat yang berdampak pada timbulnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dikarenakan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permukiman di sekitarnya serta meningkatnya keterlibatan dalam organisasi sosial. Hal ini sangat sejalan dengan pendapatnya Gaventa yang dikutip oleh Dwiningrum, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan

keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Sedangkan Otonom keterlibatan masyarakat dalam suatu proses partisipasi didalam sebuah pembangunan tanpa adanya dorongan kelompok maupun individu yang dimana kesadaran mereka lahir berdasarkan yang mereka rasakan atau suatu hal yang inginkan.²¹

Pada bagian lain Lester Milbrath dan M.L. Goel (1977), memberikan kategorisasi berdasarkan keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Herbert McLosky. Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi :

- Pertama, apatis. Artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- Ketiga, gladiator. Artinya, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yaitu sebagai komunikator, aktifis partai, dan sebagainya.
- Keempat, pengkritik, yaitu dalam bentuk partisipasi non konvensional.²²

2.4 Konsep Perencanaan Pembangunan

Menurut (Ariadi, A. 2019) perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perumusan alternatif-alternatif yang berdasarkan data-data yang digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu kegiatan kemasyarakatan.

²¹ Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

²² Surbakti, hal. 143, karya asli Milbrath dan Goel, Political Participation, Chicago: Rand McNally College Publishing Co, 1977.

Sedangkan (Azhar, 2015) mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan termasuk sumber ekonomi yang terbatas adanya yang untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.²³

Menurut (Mustanir et al. 2018) menggambarkan perencanaan pembangunan sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Sedangkan, mendefinisikan perencanaan pembangunan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.²⁴

Perencanaan pembangunan menurut (Satries, 2011) dilakukan dengan maksud ingin merumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki,
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk jangka waktu dalam mencapai sasaran tersebut
3. Masalah-masalah yang dihadapi
4. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

²³ Azhar, Fikri, 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga. ISSN: 2303- 341X.

²⁴ Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, & Rusdi, M. 2018. Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Jurnal Moderat, 4(4).

5. Kebijakan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya
6. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
7. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya.²⁵

2.4.1 Musrebang

Setiap daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah harus secara sistematis, terarah, dan terpadu serta tanggap terhadap perubahan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Adapun jenjang perencanaan jangka panjang selama 25 tahun, jangka menengah selama 5 tahun maupun jangka pendek selama 1 tahun. Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bab VII pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (Satries, 2011).²⁶

Mustanir mengemukakan bahwa Musrebang adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara bersama untuk mengidentifikasi dan menentukan proses kebijakan pembangunan masyarakat (Mustanir & Abadi, 2017).²⁷ Secara umum tujuan penyelenggaraan musrebang yakni Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan

²⁵ Satries, W. I. 2011. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrebang. *Jurnal Kybernan*, Vol. 2, No. 2

²⁶ Satries, W. I. 2011. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrebang. *Jurnal Kybernan*, Vol. 2, No. 2

²⁷ Mustanir, A., & Abadi, P, (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, *Jurnal Politik Profetik*, 5(2).

(RKPD). Kemudian, mengidentifikasi dan membahas isu-isu atau permasalahan pembangunan dalam pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan.

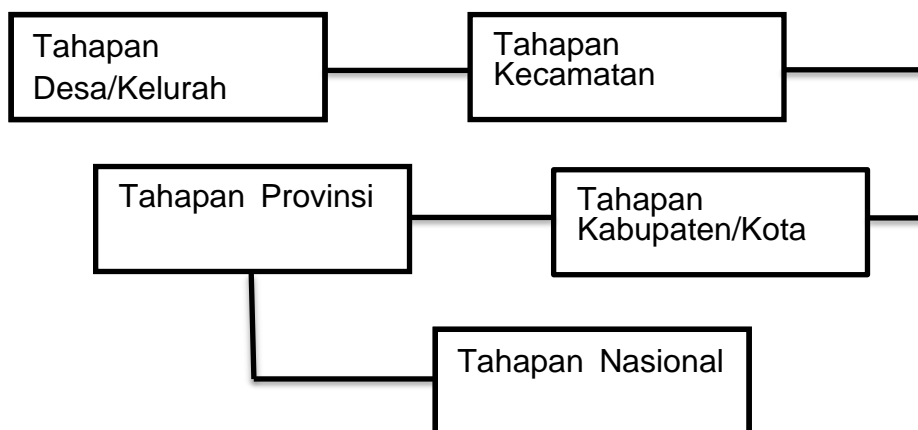
Proses perencanaan partisipatif, prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrembang sebagai bagian penting untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Sebuah kesepakatan dapat tercapai kalau semua pihak yang berkepentingan hadir dalam proses Musrembang dan memberikan masukan apa yang menjadi aspirasinya (Maryam, 2015). Maka Musrembang perlu memiliki karakter sebagai berikut:

1. Demand driven process yakni peranan besar dalam menentukan keluaran hasil musrembang berasal dari aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang.
2. Bersifat inklusif yakni musrembang memberikan dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil mustenbang melalui penyampaian masalahnya.
3. Proses berkelanjutan yakni bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD) .
4. Bersifat strategic thinking process yakni proses pembahasan dalam musrembang disusun secara terstruktur, dipandu, dan difasilitasi sesuai alur pemikiran strategis untuk mencapai hasil keluaran nyata.
5. Bersifat partisipatif yakni hasil yang diputuskan berasal dari

keepakatan bersama peserta musrembang.²⁸

Melalui mekanisme ini diharapkan dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan secara proporsional sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat. Berikut beberapa tahapan Musrembang yang bertingkat, yaitu :

Tabel 1.1 Gambar Struktur Tahapan Musrembang Sumber (Paselle, 2013)



Sumber (Paselle, 2013)²⁹

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa Untuk menetapkan prioritas pembangunan, program atau kegiatan yang akan dijalankan, serta berbagai kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Swadaya masyarakat desa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.³⁰ Sementara menurut Djohani mengungkapkan bahwa

²⁸ Maryam, D. (2015). Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus). *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas*. X,(01), 13.

²⁹ Paselle, E. 2013. Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara. *Jurnal Paradigma*, 2(1), : 10-25.

³⁰ Mustranir, A., & Razak., M.R.R.2017. Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan. Konferensi Nasional ke-6 & Asosiasi Program

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa direncanakan yang diselenggarakan oleh lembaga public, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara melihat potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik di dalam maupun luar desa.³¹

Proses Musrembang bukan suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari Musrembang adalah partisipasi aktif warga. Musrembang desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas keterwakilan wilayah, keterwakilan berbagai sektor, keterwakilan tiga unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta /bisnis, masyarakat umum), dan keterwakilan organisasi desa dalam upaya membangun desa melalui musrembang desa.

Adapun Tujuan Musrembang yaitu:

1. Menyusun dan menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang akan menjadi bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan.
2. Menyepakati tim Delegasi yang akan memaparkan persoalan yang ada di dasarnya pada forum musrembang tingkat kecamatan untuk

Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah' Aisyiyah (APPPTM).

³¹ Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 11-21.

penyusunan program pemerintah daerah (SKPD) tahun berikutnya.

Proses Umum Tahapan Musrembang dari Beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pra-Musrembang

Dalam tahapan pra-Musrembang desa/kelurahan terdiri atas pengorganisasian Musrembang, dengan membentuk tim penyelenggara Musrembang (TPM), Pembentukan Tim Pemandu Musrembang desa oleh TPM (2-3 orang) dan persiapan teknis pelaksanaan musrembang. Setelah itu, akan dilakukan pengkajian desa secara partisipatif yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mengkaji kondisi, permasalahan, dan potensi desa (per dusun/RW dan/per sector/isu pembangunan) bersama warga masyarakat penyusunan data atau informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.

2. Tahapan Pelaksana Musrembang

Tahapan pelaksana dibuka dengan pembukaan, Setelah itu. Paparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah dengan pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa. Kemudian pemaparan kepala desa mengenai hasil evaluasi RKP yang sudah berjalan, Kerangka prioritas program menurut RPJM, informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang direncanakan. Setelah itu, pemaparan pihak kecamatan, UPTD/SKPD kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan, terakhir tanggapan dan diskusi bersama warga masyarakat.

3. Tahapan Pasca-Musrembang

Rapat kerja tim perumus hasil Musrembang dengan menerbitkan SK Kades untuk tim Delegasi, penyusunan daftar prioritas masalah untuk disampaikan di Musrembang kecamatan, dan penyusunan RKP Desa sampai menjadi SK Kades (berdasarkan SAP dan Permendagri No.66/2007) atau peraturan kades (berdasarkan PP No. 72/2005), selain itu akan dilakukan Pembekalan Tim delegasi oleh TPM (Termasuk Tim Pemandu). Terakhir, melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (APB) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

2.5 Kerangka Berfikir

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat. Keberagaman suku bangsa dan kepercayaan lokal yang ada di setiap daerah merupakan suatu cerminan yang menunjukkan sebuah agama maupun kepercayaan itu sangat kental dengan tradisi dan nilai-nilai kultural yang

melekat pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Kepercayaan lokal sangat kental dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur dan nilai-nilai tersebut tetap dilestarikan sampai turun temurun yang sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kelompok masyarakat yang menganut suatu sistem kepercayaan.

Begitupun dengan komunitas Towani Tolotang secara keseluruhan kepercayaan mempunyai pengaruh kuat, atau bahkan mendominasi pandangan hidup para penganutnya. Dengan demikian, kepercayaan Towani Tolotang selain mempunyai fungsi penting pemelihara emosi keagamaan juga pemelihara intergrasi sosial. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi mobilisasi masyarakat akan berpartisipasi dalam Musrembang, tetapi di sisi lain tingkat otonom (kesadaran diri) masyarakat Towani Tolotang rendah karena masih termobilisasi pada pemimpin adat.

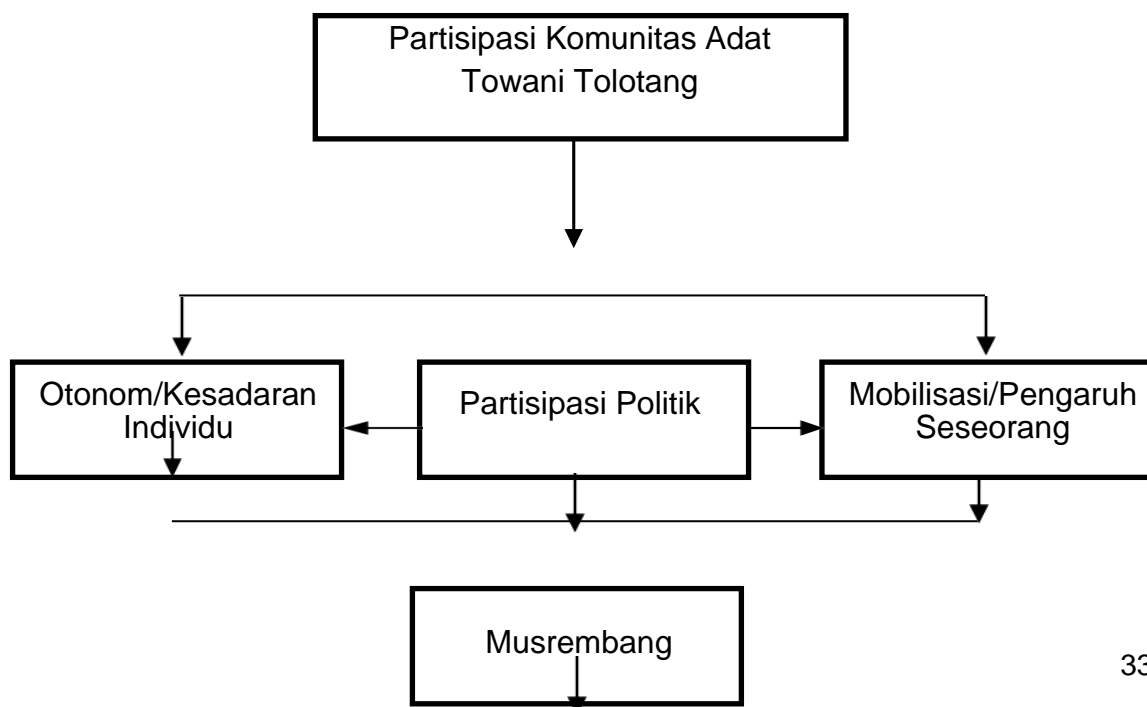
Dalam komunitas Towani Tolotang orientasi pembentukan sifat, sikap dan kelakuan terdapat dalam paseng dan pemmali. Paseng dan pemmali inilah yang secara turun-temurun diwariskan dalam keluarga masing-masing serta dianggap oleh komunitas Towani Tolotang sebagai konsep sosial yang harus dipegangi oleh setiap anggota masyarakat yang lainnya. Bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan etnik Towani Tolotang juga dianggap merupakan peribadatan kepada Dewata, besar kecilnya partisipasi anggota masyarakat terhadap suatu kegiatan akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak dikemudian hari.

Musyawaharah perencanaan pembangunan adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara terbuka yang berusaha bersama mengidentifikasi dan

menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musrembang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders terkait) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya.

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang. Musrem bang dapat digunakan sebagai proses bernegosiasi, berekonsiliasi dan berharmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsesus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan.

2.6 Skema Penelitian





2.7 Fokus Penelitian

Berdasarkan skema penelitian diatas, maka fokus penelitian ini ingin mengetahui bagaimana keterlibatan partisipasi komunitas adat Towani Tolotang, apakah mereka otonom (kesadaran individu) dan mobilisasi (pengaruh seseorang) di dalam partisipasi perencanaan pembangunan, kemudian dengan hal ini peneliti dapat memahami faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi komunitas adat Towani Tolotang dalam Musrembang pada kelurahan Amparita.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan aspek-aspek, prosedur, dan tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian ini. Dalam bab ini penulis menguraikan tipe dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah masyarakat adat Towani Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena mayoritas dan merupakan pusat dari pranata-pranata adat penganut ajaran Towani Tolotang